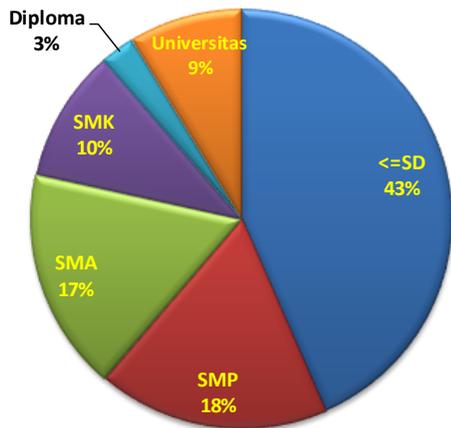




1. PRIORITAS NASIONAL PENDIDIKAN

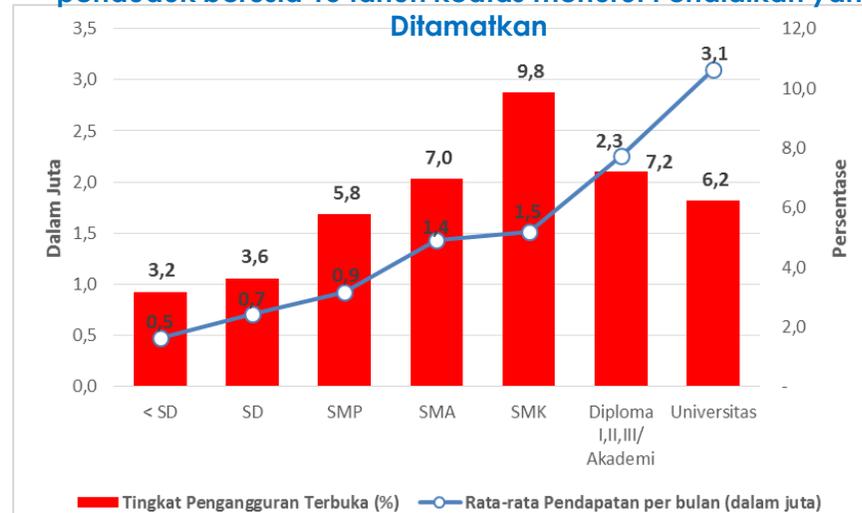
CAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

% Pekerja menurut Tingkat Pendidikan Terakhir

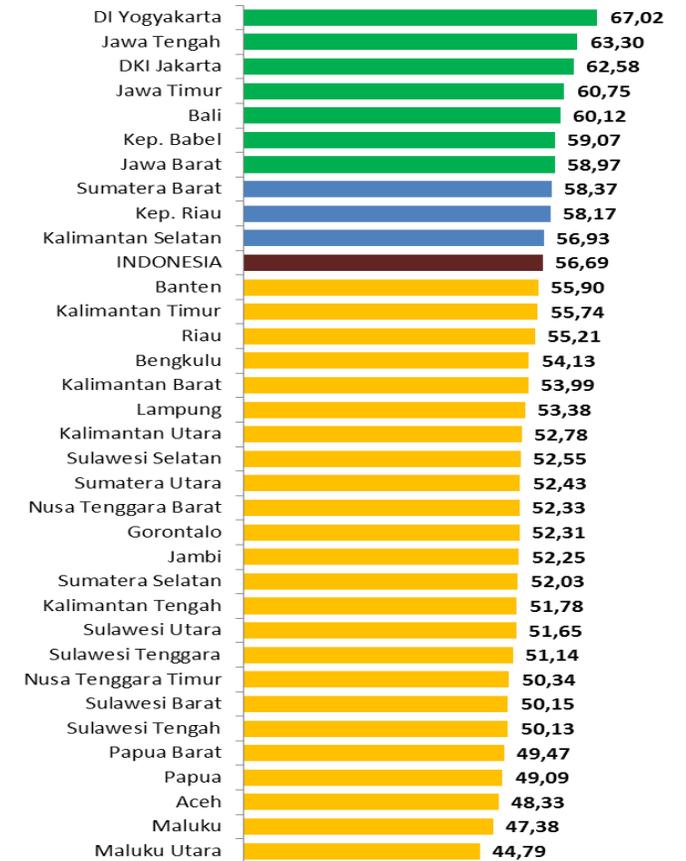


Sumber: Sakernas BPS, Feb 2016

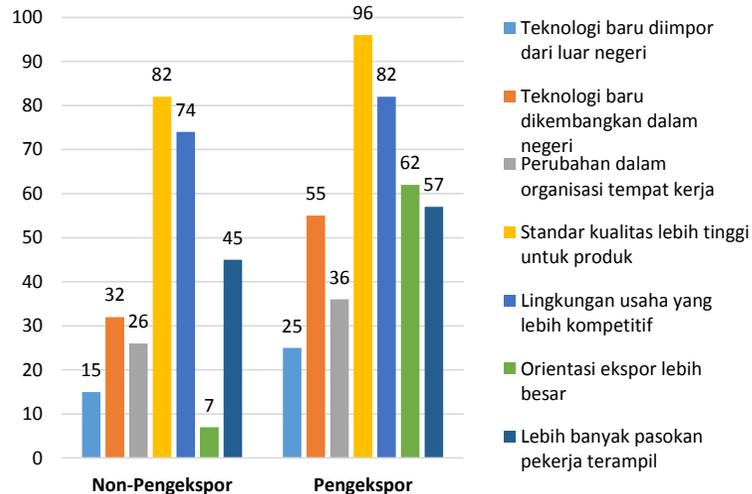
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rata-rata Pendapatan per bulan penduduk berusia 15 tahun keatas menurut Pendidikan yang Ditamatkan



Hasil Uji Kompetensi Guru 2015



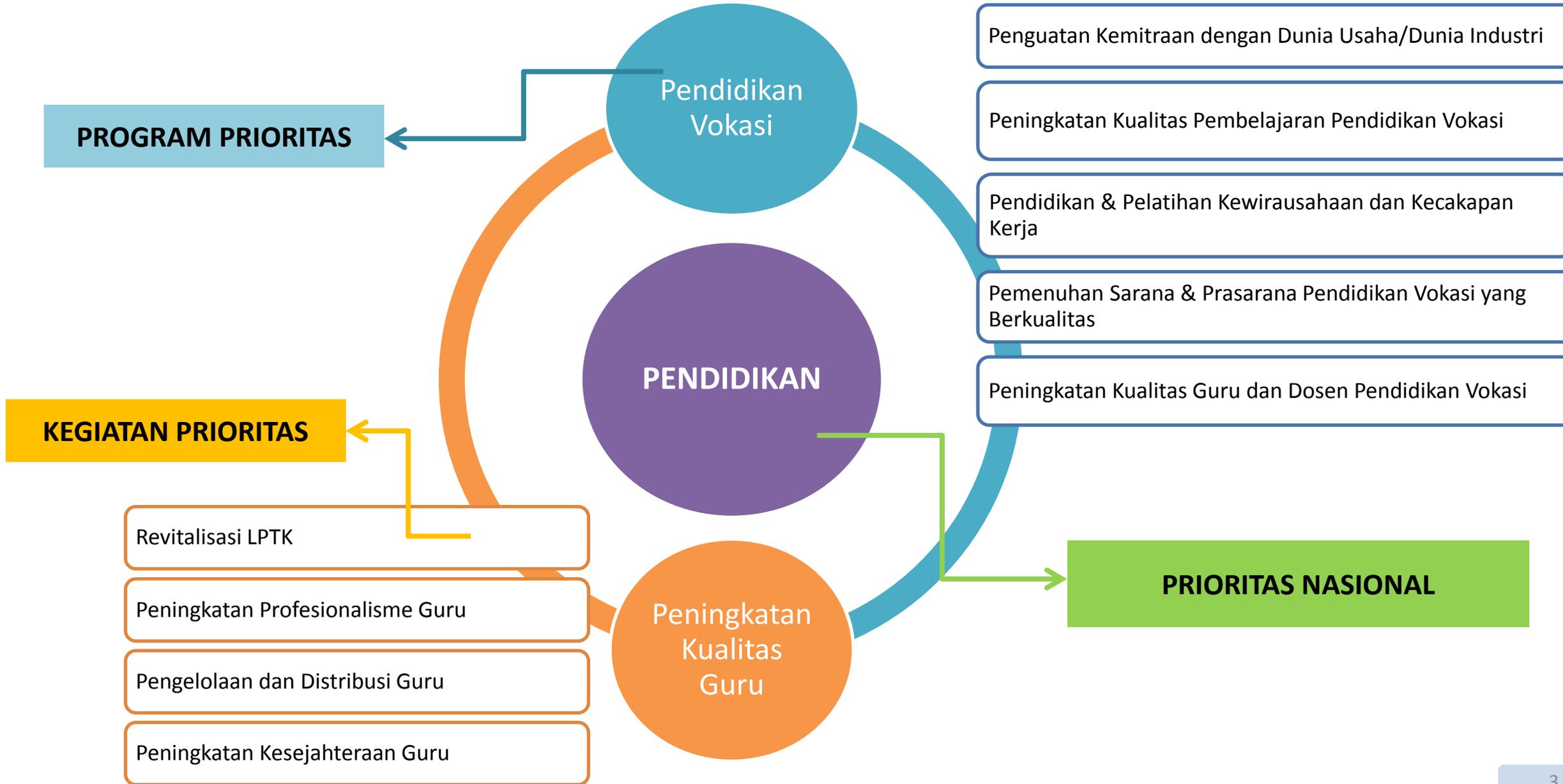
- Sekitar 73,9 juta (61%) tenaga kerja berpendidikan SMP/ sederajat ke bawah → partisipasi penduduk dlm pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu terus ditingkatkan.
- Angka pengangguran lulusan SMK sekitar 9,8 persen → perlu upaya sinergis dalam peningkatan kualitas pendidikan kejuruan.



- Survei Bank Dunia (2008) → **permintaan pemilik perusahaan terhadap tenaga kerja terampil semakin tinggi dan meningkat**, didorong standar kualitas tinggi, lingkungan usaha yang kompetitif, dan kegiatan berorientasi ekspor.
- Indonesia berambisi menjadi negara berpenghasilan tinggi → adanya peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah dengan permintaan barang dan jasa yang berkualitas.

- Kompetensi guru masih harus ditingkatkan. Hasil UKG 2015 rata-rata baru mencapai 56,69 (skala 100)
- Hanya 10 provinsi yang nilai rerata UKGnya di atas rerata nasional

ARAH KEBIJAKAN PN PENDIDIKAN



PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI

Kegiatan Prioritas

Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi

Kegiatan Prioritas

Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja

Kegiatan Prioritas

Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi

Proyek Prioritas

Proyek Penguatan Pengembangan Model Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/Swasta

Proyek Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta

Proyek Pengembangan Sistem Insentif/Regulasi untuk Mendorong Peran Industri/Swasta dalam Pendidikan Vokasi

Proyek Pengembangan Karir Lulusan Pendidikan Vokasi

Proyek Prioritas

Proyek Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Vokasi

Proyek Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi

Proyek Peningkatan Penilaian Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi

Proyek Prioritas

Proyek Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja

Proyek Prioritas

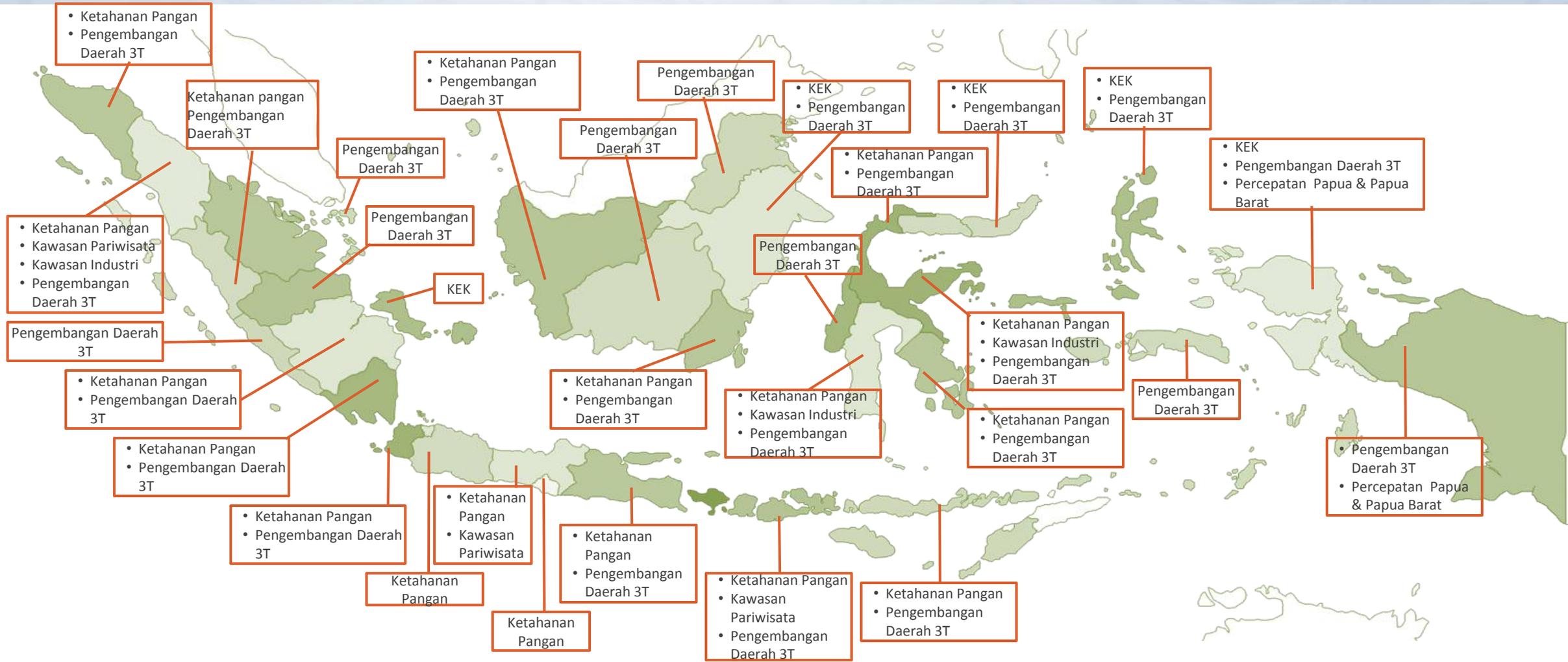
Proyek Peningkatan Prasarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi

Proyek Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi

Proyek Prioritas

Proyek Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik Vokasi

Rencana Lokasi Prioritas Pengembangan Pendidikan Vokasi Tahun 2018



Program Prioritas Pendidikan Vokasi, akan difokuskan untuk mendukung pengembangan/pembangunan pada:

PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

- 3 Provinsi Kawasan Pariwisata
- 5 Provinsi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- 3 Provinsi Kawasan Industri (KI)

PN Ketahanan Pangan

- 15 Provinsi Sentra Produksi Padi
- 10 Provinsi Sentra Produksi Jagung
- 10 Provinsi Sentra Produksi Kedelai

PN Pembangunan Wilayah

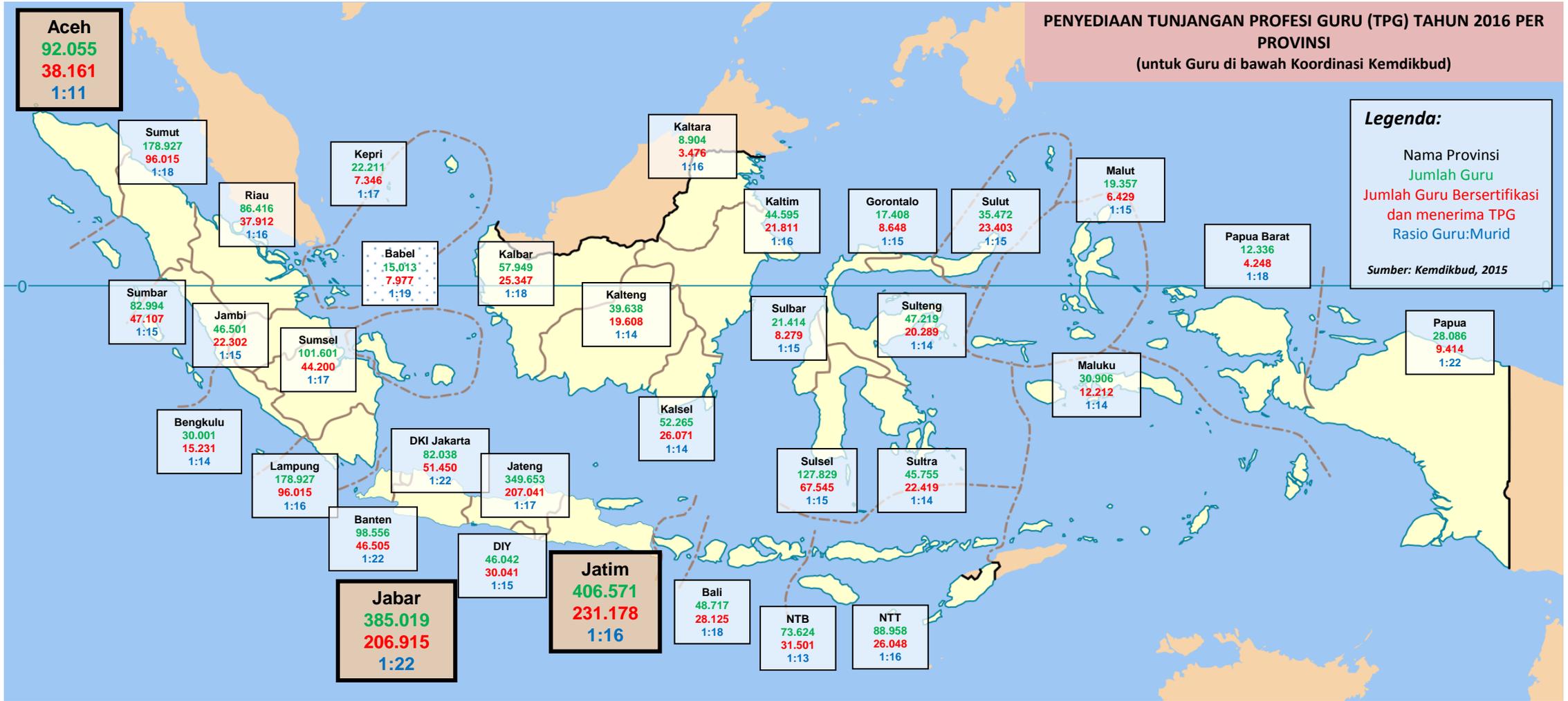
- 27 Provinsi yang memiliki daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) pada Program Prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
- Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua

RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU

Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kegiatan Prioritas
Revitalisasi LPTK	Peningkatan Profesionalisme Guru	Pengelolaan dan Distribusi Guru	Peningkatan Kesejahteraan Guru
Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas	Proyek Prioritas
Proyek Peningkatan Kapasitas LPTK	Proyek Peningkatan Kompetensi Guru	Proyek Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru	Proyek Penyediaan Tunjangan Guru
	Proyek Penilaian Kinerja Guru	Proyek Pemenuhan Guru di daerah 3T	Proyek Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan Guru
	Proyek Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru		
	Proyek Sertifikasi Guru		

Pengangkatan guru di daerah perlu memperhatikan permasalahan distribusi guru serta rasio guru:murid yang sudah sangat kecil (tidak efisien)



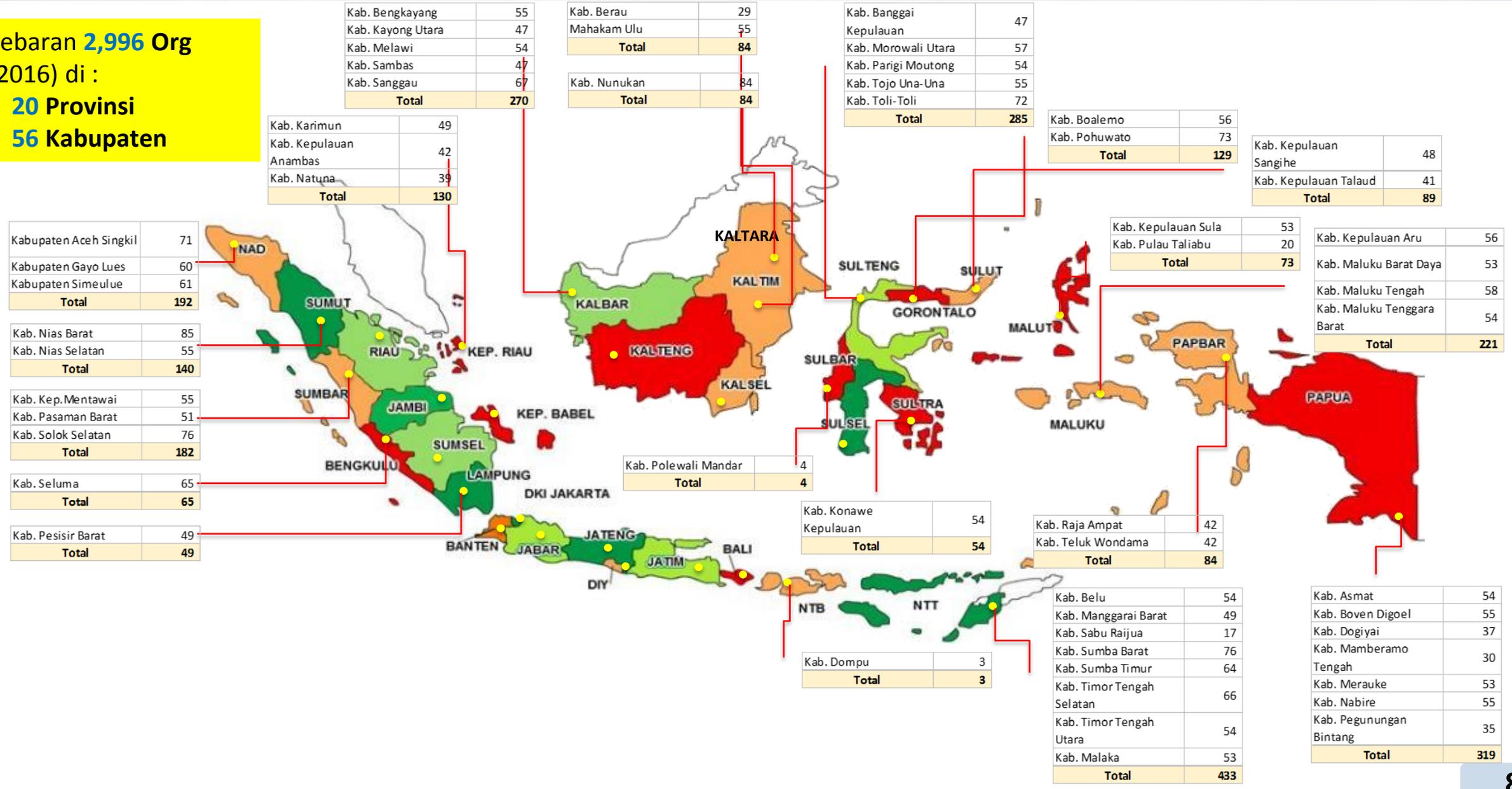
Catatan:

- Rasio guru:murid sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah 1:32 untuk SD/MI dan 1:36 untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA.

Afirmasi Pusat dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru di Daerah 3T melalui SM-3T (Tahun 2016)

Sebaran **2,996 Org** (2016) di :

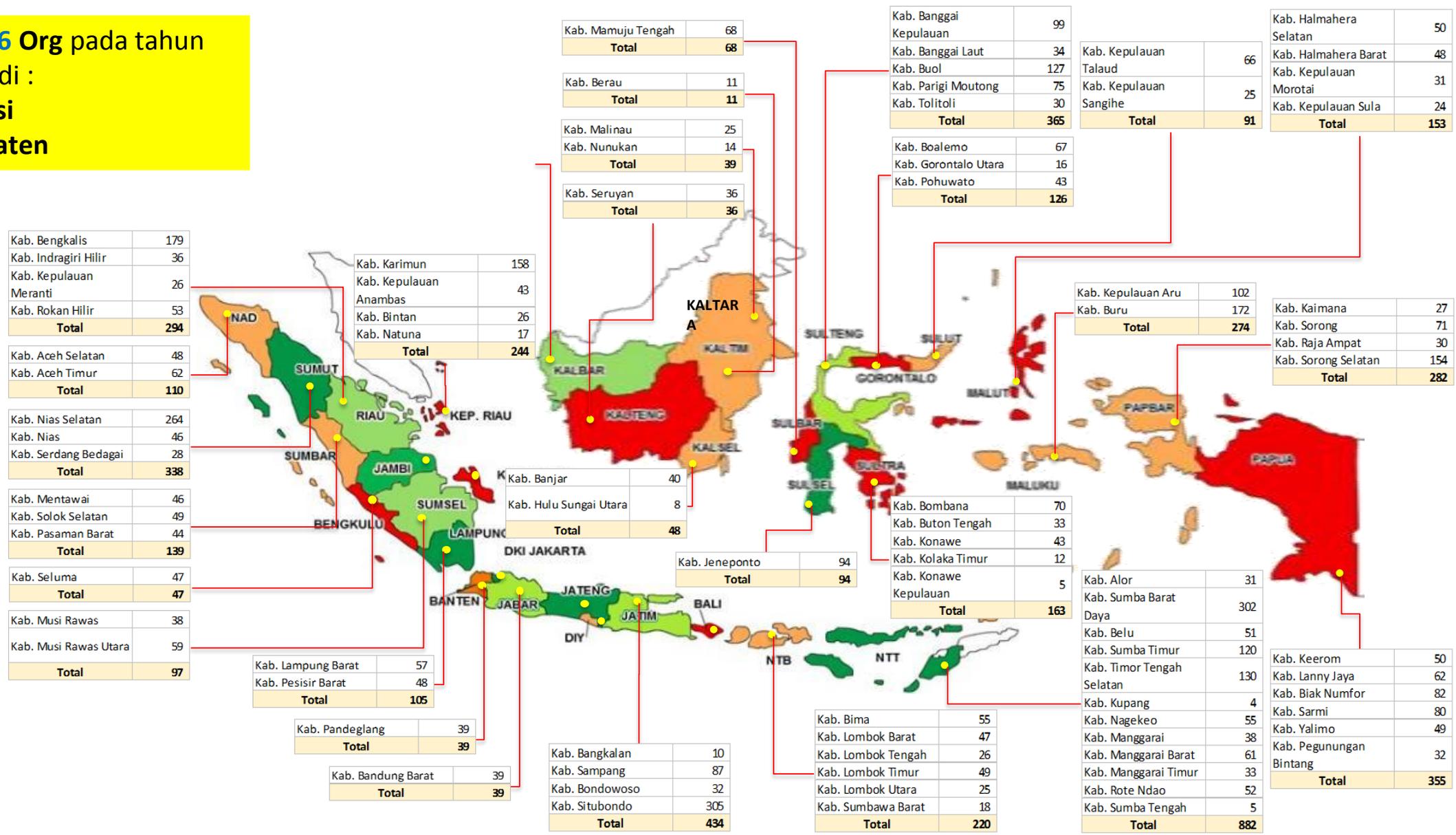
- **20 Provinsi**
- **56 Kabupaten**



Afirmasi Pusat dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru di Daerah 3T melalui Guru Garis Depan (Tahun 2016)

Sebaran **6,296** Org pada tahun 2016 berada di :

- 28 Provinsi
- 93 Kabupaten



Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
▪ Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,2 tahun	8,3 tahun	8,5 tahun	8,6 tahun	8,7 Tahun	8,8 tahun
▪ Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1% (2013)	94,8%	95,1%	95,4%	95,8%	96,1 %
▪ Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B	50,4% (2013)	55,9%	58,8%	61,8%	64,8%	68,4 %
▪ Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7%	73,9%	76,5%	79,0%	81,6%	84,2%
▪ Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5%	68,7%	71,8%	74,8%	77,9%	81,0%
▪ Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5%	77,2%	79,1%	80,9%	82,8%	84,6%
▪ Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2%	53,8%	56,6%	59,4%	62,2%	65,0%
▪ Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,86	0,87	0,88	0,89	0,90
▪ Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,53 (2012)	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60
▪ Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,07 (2012)	0,29	0,36	0,42	0,48	0,54
▪ Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV***	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
▪ Persentase guru memiliki kompetensi profesional (<i>subject knowledge</i> dan <i>paedagogical knowledge</i>)***	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
▪ Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara) **	(2012)					(2018)
- Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara)	375	386	n.a.	n.a.	n.a.	427; 50
- Sains (Ranking 64 dari 65 Negara)	382	403	n.a.	n.a.	n.a.	438; 50
- Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara)	396	397	n.a.	n.a.	n.a.	446; 45
▪ Tingkat integritas Lingkungan Pendidikan -SD-PT- (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme).	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
▪ Persentase Pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (<i>bullying free environment</i>).	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
▪ Kurikulum dan Proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman.	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*
▪ Pendidikan Agama dan etika yang menumbuhkan Akhlak Mulia.	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*	n.a.*

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan, akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel
3. **Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru**
4. Revitalisasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan
5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini
6. **Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja**
7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi
8. Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan

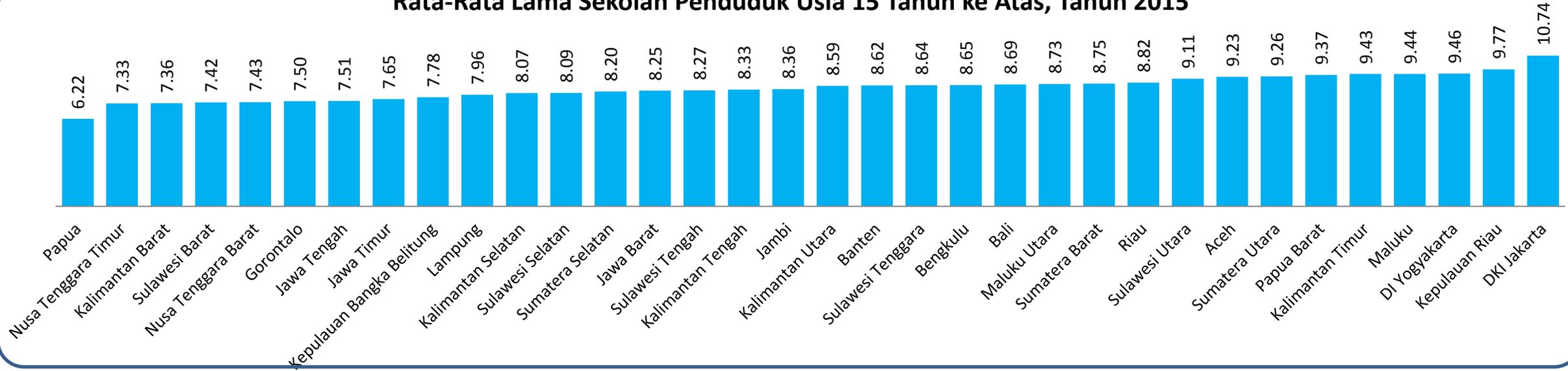
Kebijakan Terkait Revolusi Mental:

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan karakter dan budaya bangsa
2. Lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan
3. Penegakan hukum dan disiplin (bebas dari ijazah dan sertifikat palsu, plagiat, bolos)

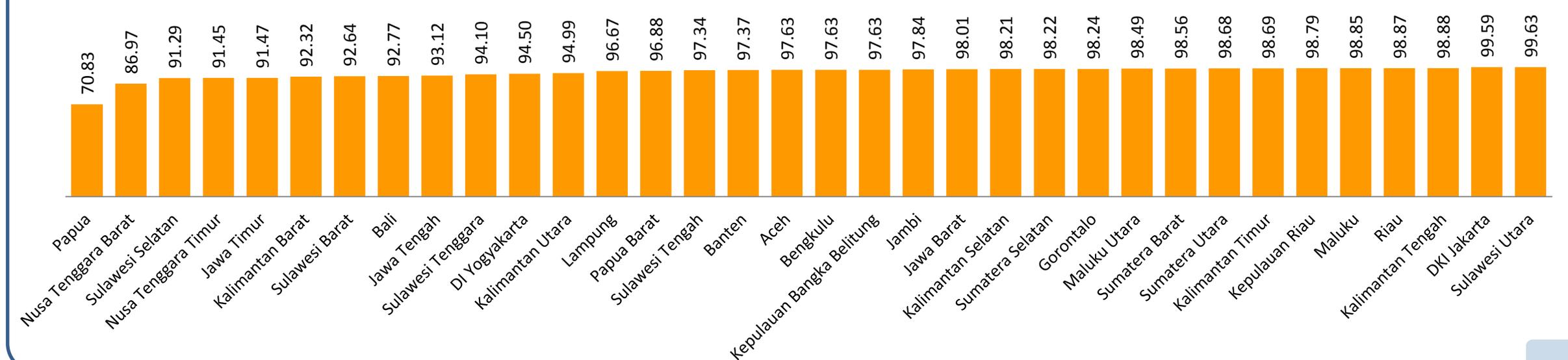
*) Akan diurusutamakan dan merupakan Indikator Kinerja Kunci Revolusi Mental
 **) Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali.
 ***) akan ditetapkan kemudian setelah kelompok guru sasaran kualifikasi dan sertifikasi disepakati dan ditetapkan

Sasaran per provinsi pada tahun 2018 dapat dihitung berdasarkan data pencapaian saat ini

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, Tahun 2015

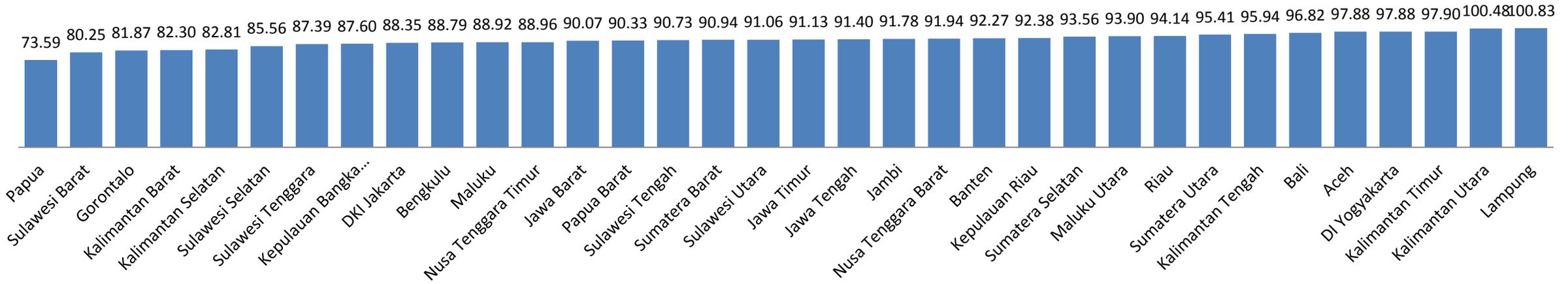


Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas, Tahun 2015

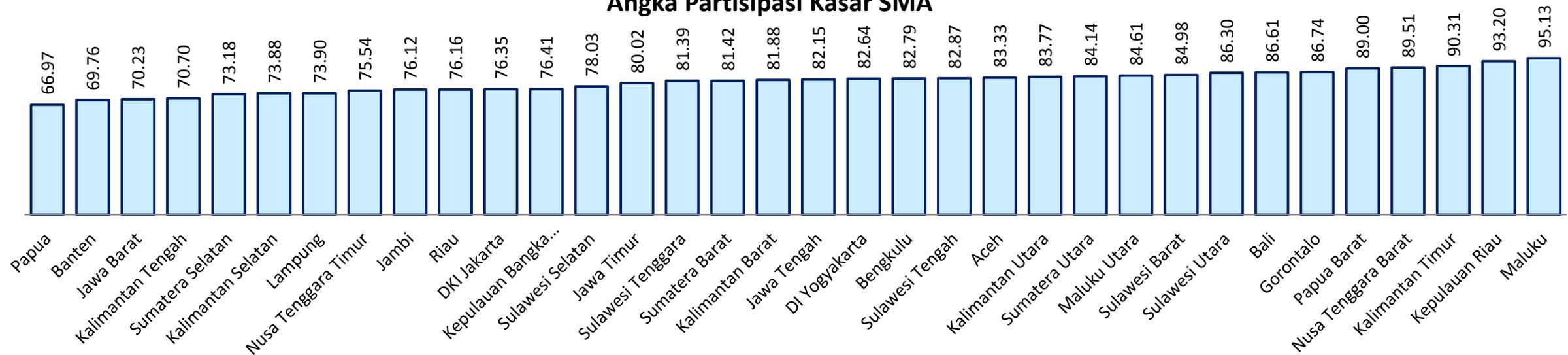


Sasaran per provinsi pada tahun 2018 dapat dihitung berdasarkan data pencapaian saat ini

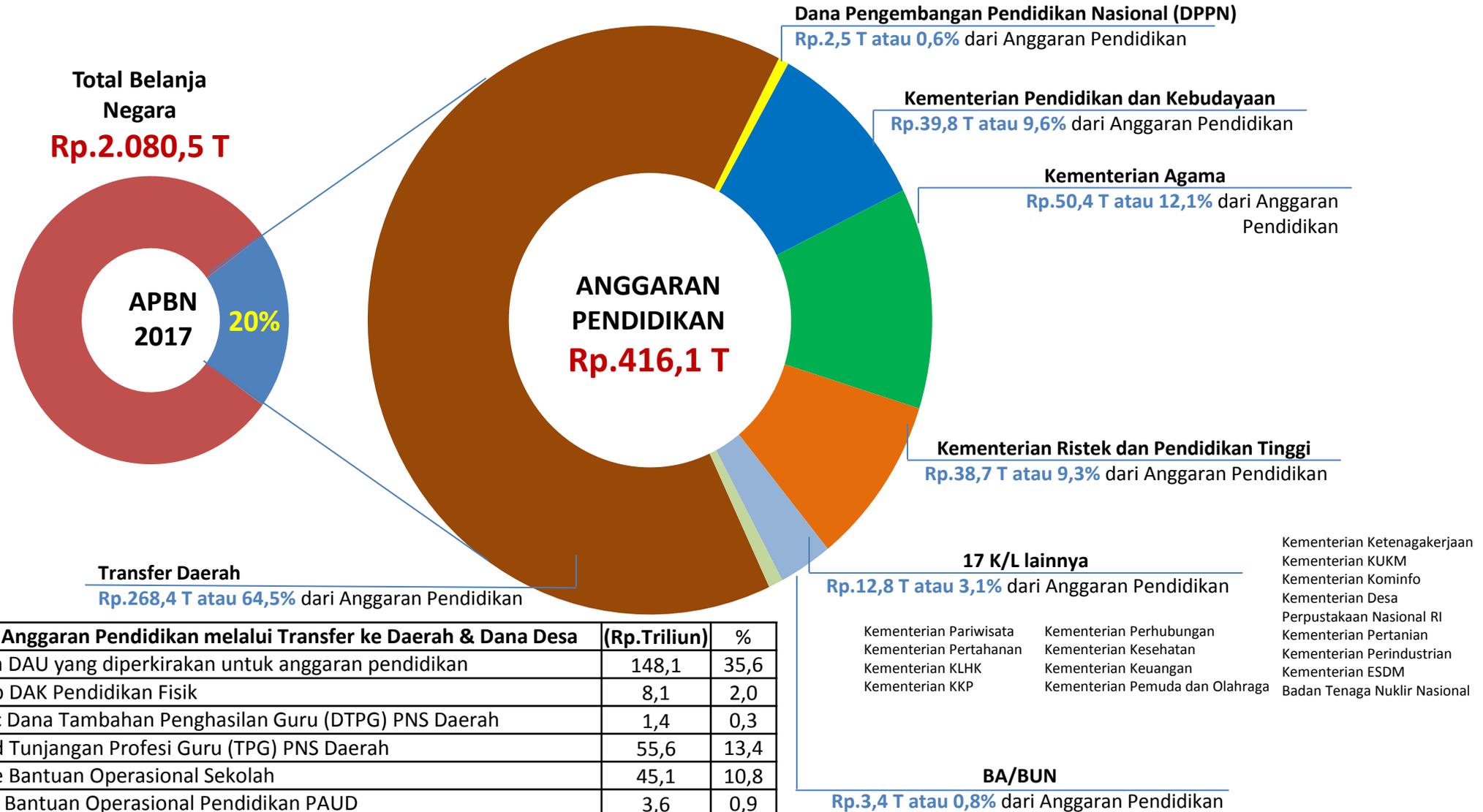
Angka Partisipasi Kasar SMP



Angka Partisipasi Kasar SMA



Perlu peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan di daerah dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan pendidikan



% Anggaran Pendidikan Daerah	Jumlah Kab./Kota	
	Hanya dari alokasi anggaran pendidikan murni daerah	Alokasi anggaran pendidikan murni daerah + dana transfer
≥ 20 %	2	354
15,01 ≤ 20%	6	17
10,01 – 15%	38	17
5,01 - 10%	176	12
< 5 %	180	2
Data tidak tersedia	107	107
Total	509	509

- ❑ Hanya terdapat **2 kab./kota** yang mengalokasikan anggaran pendidikan murni (**tanpa transfer daerah**) ≥ 20% APBD (**Kab. Pontianak dan Kab. Pangandaran**)
- ❑ Namun, terdapat **354 kab./kota** yang mengalokasikan anggaran pendidikan (**dengan menghitung transfer daerah**) ≥ 20% APBD
- ❑ Pemenuhan ketentuan anggaran pendidikan di daerah sebesar minimal 20% APBD **masih tergantung pada APBN** (melalui dana transfer daerah, dalam hal ini yaitu DAU dan DAK)
- ❑ Pada sebagian besar daerah, dengan bertambahnya alokasi anggaran pendidikan dari dana transfer ke daerah (APBN) menyebabkan daerah mengurangi alokasi APBD murni dalam memenuhi ketentuan anggaran pendidikan sebesar 20%